

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan HukumTanah*, Djambatan, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parlindungan, A.P, 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Hukum Admnistrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke-5, PT Adhitya Andrebina Agung, Jakarta
- Santoso, Urip, 2016, *pejabat pembuat akta tanah, perspektif regulasi, wewenang dan sifat akta*, cetakan ke-1, prenada media group, Jakarta.
- Salim HS, H, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Salman, S Otje dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Adiatama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktik*, cet.ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia, Aris, 2020, *Penegakan Kode Etik Notaris Perspektif Etika Deontologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian ATR/BPN; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Asriyati, “pembinaan dan pengawasan terhadap ppat sementara di desa karya bhakti kecamatan kelam permai kabupaten sintang Kalimantan barat”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariaran Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Zulkarnain, Ockhy loedvian, “Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Aditama, Purna Noor 2018, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli”, *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1.

Triyono, 2019, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya bagi Masyarakat Umum”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 17, No. 2.

Winarsi, Sri, “Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum”, *Majalah YURIDIKA*, Vol 17 No.2.

D. Website

Hery Shietra, “Kode Etik PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Melaporkan Pelanggaran Etik PPAT, serta Mekanisme Penindakan dan Penegakan Etik Profesi”, <https://www.hukum-hukum.com/2019/05/kode-etik-ppat-pejabat-pembuat-akta-tanah.html>, diakses pada tanggal 30 januari 2021.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Sekilas”, <http://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas>, diakses pada tanggal 21 januari 2021.